

ABSTRAK

Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Sedangkan, masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi : 1. Bagaimana eksistensi hak ulayat masyarakat hukum Adat Jalawastu di Kabupaten Brebes dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 juncto PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999. 2. Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah hak milik adat untuk kepentingan umum di Desa Jalawastu Kabupaten Brebes. 3. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengadaan tanah hak milik adat untuk kepentingan umum dan bagaimana penyelesaiannya.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.

Kedudukan tanah adat tercantum dalam Pasal 1 PMNA/KBPN no. 5 Tahun 1999 yang menjelaskan definisi tanah ulayat, sedangkan tanah ulayat masih diakui apabila dalam kenyataannya masih ada tatanan hukum masyarakat adat yang masih di patuhi dan masih ada aktivitas adat. Dalam pemenuhan kebutuhan sarana umum masyarakat seperti jalan umum, sekolah dan puskesmas diperlukan pengadaan tanah untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat pedesaan akan terpenuhi. Ketika adanya pengadaan akan turut pula permasalahan yang terjadi seperti lambatnya perizinan dari pemerintahan maupun dari masyarakatnya sendiri yang enggan tidak mau tanahnya dijadikan sarana umum. Dibutuhkannya sosialisasi oleh pemerintah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum akan membuat masyarakat tahu pentingnya kebutuhan sarana umum tersebut. Ketika adanya ketidakadilan dari pemerintah masyarakat hukum adat dapat menyelesaikannya melalui jalur pengadilan maupun non-pengadilan.

Kata Kunci : Tanah Ulayat, Pengadaan Tanah

ABSTRACT

Ulayat Land is a plot of land on which there is customary rights of a particular customary law community. Meanwhile, indigenous and tribal peoples are a group of people who are bound by their customary legal order as citizens together with a legal partnership because of the similarity of residence or on the basis of descent. the problems studied in this study include: 1. How the existence of customary rights of customary law community Jalawastu in Brebes regency with the enactment of Law Number 5 Year 1960 juncto PMNA / KBPN Number 5 Year 1999. 2. How the implementation of customary land rights procurement for the benefit of common in Jalawastu Village of Brebes Regency. 3. What are the factors that hamper the procurement of customary land rights for the public interest and how to solve them.

The method used is the method of juridical empirical research in other words is the type of sociological legal research and can be called also with field research that examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society.

The position of adat land is contained in Article 1 PMNA / KBPN no. 5 Year 1999 which explains the definition of ulayat land, whereas ulayat land is still recognized if in fact there is still legal order of indigenous people that still obey and still have adat activity. In fulfilling the needs of public facilities such as public roads, schools and puskesmas required land acquisition to meet these needs so that the achievement of the welfare of rural communities will be met. When the procurement will also occur the problems that occur such as slow licensing from the government and from the community itself who are reluctant to not want to be used as public facilities. The need for socialization by the government in the procurement of land for public purposes will make people aware of the importance of the need for public facilities. When there is injustice from indigenous and tribal peoples' governments it can be resolved through court or non-court proceedings.

Keywords: Ulayat Land, Land Procurement